

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama: **Ironi Perang Melawan Narkoba**

### **Ekonomi**

Merefleksi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ■

### **Politik**

Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta 2012: Kemenangan Citra Personal ■

### **Sosial**

Banjir Jakarta: Salah Urus Lingkungan atau Politik ■

Beban Kemiskinan di Perempuan dan Relasi dengan  
Persoalan Pengambilan Keputusan Publik ■

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Ironi Perang Melawan Narkoba .....	2
<b>EKONOMI</b>	
Merefleksi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) .....	6
<b>POLITIK</b>	
Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta 2012: Kemenangan Citra Persona .....	9
<b>SOSIAL</b>	
Banjir Jakarta: Salah Urus Lingkungan atau Politik .....	12
Beban Kemiskinan di Perempuan dan Relasi dengan Persoalan Pengambilan Keputusan Publik .....	16
PROFILE INSTITUSI.....	20
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN .....	21
ADVERTORIAL INDONESIA 2010 .....	23

---

**Tim Penulis :**

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),  
 Benni Inayatullah, Lola Amelia, Viza Juliansyah.

**Editor :** Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby beberapa waktu yang lalu telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Corby adalah seorang warga negara Australia yang divonis 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan ganja seberat 4,2 kg ke Bali pada 8 Oktober 2004. Grasi bagi Corby dituangkan dalam Keputusan Presiden No 22/G Tahun 2012. Keputusan itu ditetapkan pada 15 Mei 2012. Dengan keputusan tersebut, berarti Presiden memberikan pengampunan terhadap Corby dari vonis hukuman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara, ditambah dengan denda Rp 100 juta.

Reaksi keras bermunculan mengikuti pengampunan ini. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan Presiden membuat keputusan yang dianggap bertentangan dengan usaha negeri ini untuk memerangi narkoba. Sebagian pihak lainnya bahkan menganggap SBY telah melanggar Sumpah Presiden.

Argumen pembelaan diri telah dikemukakan oleh pihak kepresidenan. Beberapa alasan pengambilan keputusan tersebut dilontarkan oleh sejumlah pembantu Presiden, mulai dari menyatakan bahwa keputusan ini telah mendapat restu dari Mahkamah Agung; alasan kemanusiaan; pertimbangan politik; hingga pada pernyataan bahwa pemberian grasi adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang ironi perang melawan narkoba.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang ekonomi, politik dan sosial. Bidang ekonomi mengangkat tema tentang refleksi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Bidang politik membahas tema mengenai hasil putaran pertama pilkada DKI Jakarta 2012. Bidang sosial mengangkat tema mengenai persoalan banjir Jakarta dan tema tentang beban kemiskinan di perempuan.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

**Selamat membaca**

## Ironi Perang Melawan Narkoba

---

Pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby beberapa waktu yang lalu telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Corby adalah seorang warga negara Australia yang divonis 20 tahun penjara dalam kasus penyelundupan ganja seberat 4,2 kg ke Bali pada 8 Oktober 2004.

Grasi bagi Corby dituangkan dalam Keputusan Presiden No 22/G Tahun 2012. Keputusan itu ditetapkan pada 15 Mei 2012. Dengan keputusan tersebut, berarti Presiden memberikan pengampunan terhadap Corby dari vonis hukuman 20 tahun menjadi 15 tahun penjara, ditambah dengan denda Rp 100 juta.

Reaksi keras bermunculan mengikuti pengampunan ini. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan Presiden membuat keputusan yang dianggap bertentangan dengan usaha negeri ini untuk memerangi narkoba. Sebagian pihak lainnya bahkan menganggap SBY telah melanggar Sumpah Presiden.

### **Pembelaan Pihak Kepresidenan**

Argumen pembelaan diri telah dikemukakan oleh pihak kepresidenan. Beberapa alasan pengambilan keputusan tersebut dilontarkan oleh sejumlah pembantu Presiden, mulai dari menyatakan bahwa keputusan ini telah mendapat restu dari Mahkamah Agung; alasan kemanusiaan; pertimbangan politik; hingga pada pernyataan bahwa pemberian grasi adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat.

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali mengungkapkan tiga alasan pemberian grasi oleh Presiden kepada Corby. Hal tersebut antara lain depresi berat yang dialami oleh Corby; keyakinan Corby akan dirinya yang tidak bersalah; serta *track record* Corby yang oleh ke-

polisian Australia dinyatakan bersih dari kasus penyalahgunaan Narkoba.

Hatta Ali juga meyakinkan bahwa keputusan ini murni atas pertimbangan kemanusiaan, bukan dilandasi pertimbangan politik, seperti yang dituduhkan banyak pihak. Tuduhan akan adanya pertimbangan politik atas grasi ini sempat mencuat, dimana pengampunan ini dinilai merupakan alat tukar Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayan Indonesia yang ditahan oleh kepolisian Australia karena melintasi batas wilayah perairan Negara tersebut.

Namun, secara tidak langsung Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, dalam sebuah wawancara mengakui bahwa mungkin saja pertimbangan politis seperti permintaan dari negara asal menjadi bahan pertimbangan. Ia mencontohkan bahwa Indonesia pun sering menekan negara lain untuk membebaskan warganya yang tersangkut masalah hukum di negara tersebut. Sebagai contoh adalah kasus-kasus yang melibatkan TKI di luar negeri.

Justifikasi lain yang dihadirkan adalah fakta bahwa pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh Undang-Undang. Secara hukum, presiden berhak memberikan pengampunan kepada siapa saja yang dianggapnya pantas dengan sebelumnya perlu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Kemenkumham.

### **Penolakan terhadap Grasi**

Beragamnya alasan yang dikemukakan untuk membenarkan pemberian grasi justru menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat akan alasan sebenarnya dari pengampunan ini. Penolakan diberikan dari berbagai sudut pandang, baik itu kemungkinan adanya pelanggaran Undang-Undang hingga pada tuduhan ketidakpekaan atas kepentingan umum masyarakat Indonesia.

Bentuk protes masyarakat atas hal ini pun beragam, dari sekedar mempertanyakan, mengkritisi, hingga membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan yang terakhir disebutkan tadi dilakukan oleh pakar tata negara, Yusril Ihza Mahendra, bersama Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) yang menuntut agar grasi yang diberikan oleh Presiden dibatalkan.

Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa dari sudut pandang hukum,

keputusan tersebut bisa dipertanyakan mengingat sejak 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Di konvensi ini kejahatan perdagangan obat, narkotika dan bahan psikotropika sebagai kejahatan dilabeli sebagai kejahatan serius, dimana dalam Pasal 3 Ayat 6 tertulis bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum. Pada ayat berikutnya, ditekankan bahwa narapidana atas kejahatan ini bila hendak dibebaskan lebih awal, harus dipertimbangkan bahwa kejahatan perdagangan narkoba merupakan kejahatan serius. Pertanyaannya kemudian, apakah Presiden sudah memperhatikan hal undang-undang tersebut dalam mengabdikan grasi Corby?

### **Permasalahan Narkoba di Indonesia**

Betapa seriusnya masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia tercermin dari statistik yang berhubungan dengan hal ini. Saat ini, sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia atau 2,2% merupakan penyalahguna narkoba. Diperkirakan pada akhir tahun ini angka tersebut akan mencapai 5,1 juta penduduk (BNN, 2012).

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkotik di Indonesia pada tahun 1997 hanya 602 kasus, namun jumlah ini meroket hingga 40 kali lipat pada tahun 2011 menjadi 26.500 kasus (Bareskrim Polri, 2011). Rata-rata perputaran uang dalam industri ini sepanjang tahun mencapai 42,8 triliun dan Indonesia menjadi pasar narkoba terbesar ketiga di dunia (BNN, 2011).

Statistik di atas jelas tidak bisa dianggap remeh. Terutama jika mengingat penyalahgunaan narkoba biasanya merupakan kejahatan pangkal atau kejahatan yang berdampak pada munculnya pelanggaran dan permasalahan sosial lainnya seperti kriminalitas, pelanggaran lalu-lintas, atau meningkatnya penyebaran HIV/AIDS. Khusus untuk penyebaran HIV/AIDS, tercatat 90 persen resiko penularan penyakit ini adalah dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik (Depkes, 2009).

Belum lagi jika kita membahas dampak jangka panjang dari penyebaran narkoba. Pada tahun 2008, 93 persen pengguna narkoba berada pada usia produktif, yakni 15 hingga 34 tahun. Angka ini memperlihatkan potensi kerusakan yang luar biasa bagi sumber daya

manusia bangsa ini untuk beberapa tahun ke depan (BNN, 2008).

### **Mempertanyakan Komitmen Pemerintah**

Mengatasi masalah narkoba memerlukan komitmen dan tindakan yang komprehensif dari semua pihak. Ini dimulai dari keaktifan warga dalam menghambat peredaran di sekitar mereka; aparat penegak hukum yang tegas melakukan penindakan; hingga petinggi negara yang membuat kebijakan sebagai dasar hukum. Lemahnya salah satu saja dari bagian ini akan membuat sia-sia usaha yang dilakukan oleh pihak lain.

Pemberian grasi kepada pengedar narkoba, membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Merupakan sebuah ironi, jika bangsa yang di satu sisi begitu parah di rusak oleh narkoba, namun di sisi lain menganulir keputusan pengadilan dengan memberikan keringanan hukuman pada penyebar barang haram tersebut.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memprotes kebijakan Presiden mengenai grasi ini, karena hak tersebut merupakan hak presiden yang dilindungi oleh Undang-Undang. Namun, ini bukan hanya permasalahan hukum. Ini permasalahan komitmen. Seberapa jauh pimpinan negeri ini berkomitmen dalam mencegah kehancuran bangsa?

*Mengatasi masalah narkoba memerlukan komitmen dan tindakan yang komprehensif dari semua pihak. Ini dimulai dari keaktifan warga dalam menghambat peredaran di sekitar mereka; aparat penegak hukum yang tegas melakukan penindakan; hingga petinggi negara yang membuat kebijakan sebagai dasar hukum. Lemahnya salah satu saja dari bagian ini akan membuat sia-sia usaha yang dilakukan oleh pihak lain.*

**-Viza Juliansyah-**

## Merefleksi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2007 hingga 2012 sekarang, menurut data dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program ini sudah mencakup 1.237 desa, di 6.703 kecamatan di 33 provinsi di Indonesia.

Dengan sumber pendanaan beragam dari Bank Dunia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan per 2011 dana PNPM mencapai 10,5 Triliun.

Dengan anggaran dan juga cakupan program yang demikian besar, maka dalam lima tahun pelaksanaannya, apakah tujuan PNPM untuk mengurangi kemiskinan di seluruh Indonesia dengan prinsip partisipasi, pemberdayaan dan transparansi sudah tercapai? Atau adakah kemajuan yang berarti?

### Nilai Tambah dan Kekurangan PNPM

Nilai tambah dari pelaksanaan PNPM terlihat pada, *pertama*, PNPM mempermudah aksesibilitas warga. PNPM telah membangun dan memperbaiki infrastruktur di tingkat kelurahan dan desa yang dianggap menjawab kebutuhan warga, seperti penyediaan sumur bor, jalan desa dan lain sebagainya.

*Kedua*, PNPM telah mendorong mobilisasi sumber daya masyarakat untuk berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan. *Ketiga*, PNPM dalam prosesnya menggunakan sumber daya local, tenaga kerja lokal dan biaya pembangunan yang lebih rendah dibandingkan dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh dinas terkait di luar proyek PNPM.

Selain sisi positif dari program PNPM tersebut, kekurangan atau sisi negatif dari program tersebut juga tidak sedikit, seperti diuraikan

pada bagian berikut ini.

*Pertama*, dalam proses pelaksanaan program. Sosialisasi yang dilakukan melalui struktur pemerintahan dan jaringannya secara berjenjang memberi peluang bagi terbangunnya peran dominan elit lokal dan peminggiran kembali golongan miskin, sehingga kurang menyentuh substansi penanggulangan kemiskinan dan pentingnya keterlibatan golongan miskin. Pengetahuan warga miskin atas PNPM lebih banyak diperoleh melalui jaringan informal.

Hal lainnya, pembentukan kelembagaan pelaksana lebih sering ditentukan oleh aparat ketimbang ditentukan oleh warga terutama golongan miskin. Dalam banyak kesempatan dapat dengan mudah ditemui keterwakilan perempuan dalam kelembagaan pelaksana hanya bersifat formalitas-prosedural ketimbang deliberatif-substansial.

Meski para pelaksana PNPM memperoleh pengembangan kapasitas, namun tidak serta-merta memungkinkan mereka untuk segera mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Penentuan penerima sasaran misalnya seringkali ditemui dilakukan mendadak dan hanya ditujukan untuk memudahkan tugas para pelaksana tanpa kriteria yang tepat.

*Kedua*, kekurangan dalam aspek partisipasi kelompok miskin. Golongan miskin masih minim terlibat dalam pekerjaan fisik. Dalam banyak hal, pembangunan infrastruktur masih minim kualitas, jauh dari akses warga dan belum memperhatikan kondisi wilayah, serta (terutama) sebaran golongan miskin.

Khusus pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sosialisasi melalui PKK Desa telah menyebabkan akses perempuan miskin terhadap modal menjadi lebih kecil. Persyaratan dan bunga pinjaman dianggap memberatkan perempuan miskin dan menimbulkan kemacetan. Selain itu, minim dijumpai pendampingan usaha kepada warga penerima pinjaman.

*Ketiga*, kekurangan terkait dampak dari program PNPM itu sendiri. Besaran manfaat program PNPM masih belum memadai karena sifat pekerjaan musiman/temporer tidak cukup sebagai sumber hidup layak keluarga. Akses keuangan yang dibuka untuk kelompok miskin masih terkendala meski kriteria dan pedoman disusun oleh warga sendiri.

Kekurangan lainnya, program belum mampu menjangkau

perempuan miskin. Pembangunan infrastruktur misalnya Polindes (Poliklinik Desa), meskipun tepat guna, tetapi lokasinya tidak terjangkau. Kemudian kompetisi antar kelompok dan antar desa di beberapa tempat menurunkan nilai kohesi sosial.

### **Kesimpulan**

Dari paparan beberapa nilai tambah PNPM di atas, terlihat bahwa PNPM berdampak positif pada tingkat komunitas, tingkat Kelurahan/desa. Tidak terlihat ada dampak positif bagi pengurangan kemiskinan di level rumah tangga. Hal ini terbukti dengan uraian berbagai kekurangan atau aspek negatif dari PNPM, yang dominan pada level rumah tangga.

Di tingkat nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa per Maret 2012 lalu jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 29,13 juta jiwa (11,96 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen), ada penurunan sebesar 0,53 persen. Namun, jika dibandingkan dengan data sejenis pada tahun 2007 saat pertama kali PNPM diprogramkan, angka kemiskinan di angka 11,3 persen. Walau tidak signifikan, data tahun 2012 ini lebih kecil.

Fluktuasi angka kemiskinan di atas memang tidak serta-merta memperlihatkan kegagalan PNPM dalam mencapai tujuannya. Namun, sebagai program penanggulangan kemiskinan terbesar, refleksi terhadap pelaksanaan dan dampaknya perlu terus dilakukan untuk mencari signifikansi dari program ini.

Oleh karena itu, di tingkat nasional, perlu ada perubahan paradigma bahwa kemiskinan tidak bisa diukur secara ekonomi saja, namun juga aspek politis. Jamak diketahui kebijakan makro pembangunan yang bias Jawa, atau bias terrestrial, turut meningkatkan angka kemiskinan. Dalam poin ini, penting kemudian program-program PNPM tidak diseragamkan di seluruh provinsi, namun betul-betul berorientasi kebutuhan lokal, seperti tujuan awal program ini sendiri.

**-Lola Amelia-**

*Dengan cakupan program di seluruh Indonesia dan dengan anggaran yang lebih dari 10 triliun setiap tahunnya, ternyata belum ada data terukur terkait kontribusi PNPM pada penurunan angka kemiskinan khususnya, dan signifikansi peran PNPM bagi pembangunan Indonesia secara umum.*

## **Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta; Kemenangan Citra Personal**

Perkiraan banyak lembaga survei seperti Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Indo Barometer, Jaringan Survei Indonesia dan beberapa lembaga survei lainnya bahwa Fauzi Bowo – Nachrowi Ramly (Foke-Nara) akan memenangkan pemilihan pertama Pilgub Jakarta meleset.

Berdasarkan hasil *quick qount* berbagai lembaga survei menunjukkan kesamaan, yakni pasangan Jokowi-Basuki menempati peringkat pertama dengan perolehan sekitar 42 % jauh di atas pasangan Foke-Nara yang berkisar di angka 34 %.

Berikut perbandingan antara survei beberapa hari menjelang Pilgub serta hasil *quick qount* yang diambil dari data Jaringan Survei Indonesia (JSI). Survei ini dilangsungkan pada 28 Juni - 2 Juli 2012 dengan jumlah responden 1200 orang dan *margin of error* 2,9 %.

No Urut	Kandidat	Survei JSI	Quick Qount JSI
1	Fauzi- Nachrowi	49,6 %	34,42 %
2	Hendardji-Riza	1,0 %	1,88 %
3	Jokowi-Basuki	15,8 %	41,97 %
4	Hidayat-Didik	6,4 %	11,4 %
5	Faisal-Biem	1,9 %	5,15 %
6	Alex-Nono	4,3 %	5,16 %

Terlihat perbedaan antara temuan survei dengan *quick qount* yang cukup jauh. Bila dibandingkan antara hasil survei dengan *quick qount* JSI, Foke-Nara terlihat kehilangan sekitar 15,18 % dari hasil survei terakhir. Sementara Jokowi-Basuki melejit dengan selisih sebesar 26,17 %. Sedangkan kandidat lainnya tidak mengalami pergeseran yang signifikan.

## Survei Pesanan ?

Jauhnya perbedaan antara temuan survei dengan hasil *quick count* mengundang perdebatan di publik tentang integritas lembaga survei. Tersebutlah bahwa lembaga survei dituduh telah melakukan manipulasi data berdasarkan kepentingan pemesan survei.

Tudingan terhadap lembaga survei ini seringkali muncul dalam kasus yang sama dalam beberapa Pilkada. Tulisan ini tidak akan membahas kegagalan survei secara metodologi, namun menampilkan penilaian masyarakat tentang kegagalan lembaga survei dalam memprediksi Pilkada DKI Jakarta 2012.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai, lembaga survei telah gagal membaca situasi politik pada Pilkada Jakarta. Sekretaris Jenderal DPP PPP, M Romahurmuziy mengatakan bahwa lembaga survei tidak akan pernah mampu menjelaskan arah pilihan *swing voters*.

Menurutnya melompatnya perolehan *quick count* Jokowi dari prediksi seluruh lembaga survei yang berkisar 17-20 persen, menjadi 44 persen, menunjukkan Jokowi mampu menyedot hampir seluruh perkiraan *swing voters* yang di *pollster* tertangkap sebesar 26 persen.

Pro kontra mengenai lembaga survei nampaknya memang akan terus mengemuka seiring dengan kegagalan semua lembaga survei dalam memprediksi hasil Pilgub DKI.

## Kemenangan Citra Personal?

Kemenangan Jokowi-Basuki—meskipun masih menunggu hasil resmi dari KPUD—memberikan sebuah fenomena menarik bagi proses demokrasi di DKI Jakarta. Fauzi Bowo sebagai petahana memiliki hampir segala hal untuk menang dalam Pilkada 11 Juli lalu. Antara lain; *pertama*, popularitas paling tinggi; *kedua*, memiliki sumber daya finansial paling besar; dan *ketiga* sebagai petahana memiliki kedekatan dengan jalur birokrasi.

Ketiga hal tersebut dalam situasi normal diperkirakan akan mempermulus kemenangan Foke-Nara dalam Pilkada seperti yang digambarkan semua lembaga survei. Namun, dari hasil Pilkada kemarin dapat kita lihat bahwa Foke-Nara dapat dikalahkan oleh Jokowi-Basuki yang tidak memiliki sumber daya finansial sebesar Foke-Nara, tidak memiliki popularitas sebesar Foke-Nara, serta tidak memiliki akses ke birokrasi.

Perbedaan antara kedua pasangan ini adalah mengenai sisi kepribadian dan rekam jejak dalam benak masyarakat. Foke-Nara selama ini dicitrakan publik sebagai pemimpin yang tegas namun arogan. Sementara Jokowi lebih dikenal sebagai sosok yang santun dan membaur dalam masyarakat.

Selain itu, perbedaan terletak dalam citra kinerja pemerintahan, dimana Jokowi dicitrakan berhasil memimpin Solo. Sedangkan bagi sebagian warga Jakarta, Foke dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan krusial di Jakarta.

Tampaknya sisi kepribadian yang lebih menentukan dalam kemenangan Jokowi-Basuki. Karena bila dilihat dari sisi kinerja selama memerintah, Alex Noerdin juga dicitrakan berhasil dalam memimpin Sumatera Selatan. Alex Noerdin justru yang paling berhasil membangun citra bahwa ia telah memberikan sekolah dan pengobatan gratis bagi warganya di Sumatera Selatan. Alex mampu mengangkat kedua isu tersebut yang akhirnya juga dicontoh dan diikuti kandidat lainnya bahkan oleh Foke-Nara.

Tentu sebab kemenangan Jokowi-Basuki tidak hanya dari sisi kepribadian semata. Banyak hal tergantung dari sisi penilaian, namun dalam bahasan yang singkat ini nampaknya bisa diambil kesimpulan sementara bahwa faktor personal Jokowi yang merakyat dan membaur bersama warga, serta rekam jejak yang bagus menjadi daya tarik utama bagi warga DKI Jakarta yang selama ini merasa Foke tidak mampu menuntaskan persoalan mereka.

Dengan kenyataan itu, Jokowi berhasil muncul sebagai figur alternatif pertama bagi warga DKI Jakarta yang menginginkan perubahan kepemimpinan DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan.

Namun, hipotesa di atas masih harus diuji pada Pilgub putaran kedua yang direncanakan diadakan pada 20 September 2012. Citra kepribadian dan rekam jejak Jokowi-Basuki akan kembali diadu dengan keunggulan finansial dan jalur birokrasi yang dimiliki Foke-Nara.

**-Benni Inayatullah-**

*Kemenangan awal Jokowi-Basuki bisa diartikan kemenangan sisi personalitas dan rekam jejak terhadap kekuatan finansial dan birokrasi. Hal ini merupakan angin segar bagi kematangan berdemokrasi di Jakarta dan Indonesia.*

## Banjir Jakarta: Salah Urus Lingkungan atau Politik ?

---

Tahun 2012, mempunyai arti penting bagi DKI Jakarta. Pada bulan Juni tahun ini Jakarta berusia 485 tahun. Kemudian pada bulan Juli tahun ini pula dilangsungkan Pemilihan Gubernur Jakarta (Pilgub).

Ada banyak masalah yang masih menjadi beban Jakarta di usianya yang ke 485 tahun dan sekaligus menjadi tantangan pemenang Pilkada DKI tahun ini, dan salah satunya adalah persoalan banjir.

Banjir besar pertama kali melanda Jakarta pada tahun 1621 (abad ke-17). Sudah ada sekian gubernur Jakarta yang memenangi Pilkada, tetapi Jakarta tak juga bebas banjir. Langkah-langkah pengendalian banjir selama ini seperti pembangunan Kanal Banjir Barat dan Timur, pembuatan polder, perbaikan gorong-gorong, dan sebagainya. Dari 76 titik banjir di seluruh Jakarta, baru tertangani 16 titik banjir saja.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menginisiasi proyek penanggulangan banjir bersama dengan pemerintah Kota Rotterdam, Belanda yaitu pembangunan *giant sea wall* (dam laut raksasa) di sepanjang Pantai Utara Jakarta. Proyek ini dinilai Pemprov sebagai proyek mutakhir yang akan bisa menyelesaikan masalah banjir Jakarta.

Meskipun ada pengurangan “kualitas” banjir namun kebijakan penanggulangan banjir selama ini dinilai hanya berdampak untuk wilayah dan waktu tertentu, belum masif untuk seluruh wilayah dan penduduk Jakarta.

### **Dimensi Lingkungan**

Ada banyak faktor dan dimensi yang menyebabkan banjir Jakarta. Mulai dari kaitannya dengan masalah lingkungan dan bahkan ke permasalahan politik perkotaan. Kedua faktor ini saling berkelindan, saling bertaut, dan berhubungan sebab-akibat.

Terkait permasalahan lingkungan, setidaknya ada dua dimensi yang

bisa dilihat, yaitu terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan sampah. Jakarta sendiri kritis RTH. RTH Jakarta saat ini hanya sebesar 9,6 % dari total 657 kilometer persegi luas Jakarta.

Luas yang diamanatkan oleh UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30%. Sedangkan Pemprov DKI hanya menargetkan 14,27 % RTH pada tahun 2030. Jika dilihat dari sejarah RTH Jakarta, pada tahun 1970 luas RTH Jakarta adalah 37,4 % dan pada tahun ini seluas 9,6 % saja (WALHI,2010).

Penyebab berkurangnya RTH Jakarta adalah karena peralihan fungsi RTH ke berbagai bangunan mal, apartemen atau pun kantor-kantor. Terkait Penyerobotan RTH ini sering kali kemudian persoalan tersebut “diputihkan” lewat peraturan daerah. Artinya, setiap perancangan peraturan daerah mengenai penataan ruang dan wilayah, komitmen DKI Jakarta untuk menyediakan RTH selalu berkurang.

Dengan demikian, daerah yang di peraturan sebelumnya masuk dalam kategori RTH di peraturan berikutnya bisa berubah fungsi menjadi kawasan perdagangan. Hal ini mengakibatkan para pelaku penyerobot RTH tak bisa dipersalahkan karena sudah sesuai dengan peraturan yang baru dan di sisi lain RTH Jakarta semakin berkurang.

Terkait persoalan sampah yang merupakan masalah besar bagi Jakarta, berdasarkan data dari Dinas Kebersihan Provinsi Jakarta, per 2011, volume sampah di Jakarta perharinya adalah sebesar 6.925 ton. Sampah tersebut adalah sampah industri hingga sampah rumah tangga. DKI Jakarta selama ini tidak punya Tempat Pembuangan Akhir Sampah, dan sampah-sampah dari Jakarta ditempatkan di luar Jakarta, misalnya di Bantar Gebang, Bekasi.

Tentunya, DKI Jakarta seharusnya bisa mengelola sampah yang dihasilkannya sendiri, mulai dari asal hingga ke pembuangan akhir atau hingga ke pengolahannya. Hal ini mendesak dilakukan, apalagi karena sudah adanya UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pemprov DKI harus segera mengoperasionalkannya dalam Perda atau Peraturan Gubernur.

### **Dimensi Politik**

Namun, walaupun ada banyak faktor tersebut, yang paling penting untuk diulik dan kemudian diintervensi adalah “operator” atau pihak yang berwenang mengambil kebijakan-kebijakan mengatur segala faktor lingkungan yang kemudian menjadi sangat teknis terkait

banjir ini.

Dari sana sebenarnya sangat jelas nuansa politik kota, dalam artian bagaimana pemerintah provinsi mengambil langkah politik lingkungan atau politik tata ruang untuk menyelesaikan masalah banjir ini.

Lebih jauh, hal ini kemudian terkait dengan paradigma pembangunan yang dianut Pemprov Jakarta. Paradigma pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pro investor dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setinggi-tingginya. Dengan fokus ini, pembangunan yang digalakkan adalah membangun pusat-pusat perbelanjaan, *property* dan infrastruktur jalan pendukung industri yang sebelumnya (Herlambang, 2011).

Masih terkait kebijakan Pemprov, yang perlu kita lihat juga adalah tentang manajemen pemerintahan di Jakarta itu sendiri. Saat ini ada empat deputy gubernur DKI Jakarta dan salah satunya adalah Deputy Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Menurut Pemprov DKI Jakarta, kehadiran deputy-deputy ini adalah untuk mendukung kinerja pemprov dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.

Namun pada kenyataannya, seringkali kebijakan para deputy ini bentrok dengan kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Misalnya, terkait penataan ruang, Deputy Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai rancangan sendiri dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) juga punya rancangan sendiri.

Mengingat para deputy tidak berada di struktur perangkat daerah provinsi DKI Jakarta dan wewenangnya hanya memberikan nasehat kepada Gubernur, sering kemudian para deputy tersebut “tidak berfungsi” / “tidak bergigi”.

Di sisi lain, warga Jakarta jarang sekali dilibatkan dalam berbagai musyawarah atau pertemuan untuk pengambilan keputusan terkait Jakarta, termasuk permasalahan tata ruang. Padahal sudah ada dasar hukumnya di tingkat provinsi, yaitu Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Keengganan Pemprov DKI Jakarta melibatkan warganya, ditenggarai dikarenakan oleh cara pandang Pemprov itu sendiri terhadap warganya.

Warga hanya dipandang sebagai sasaran berbagai kebijakan, tapi bukan sebagai salah satu sumber daya yang memiliki sumber

pengetahuan yang jika digali akan membuat semua kebijakan pemerintah provinsi menjadi tepat guna dan sasaran (Koalisi Warga Jakarta 2030, 2011).

Hal penting lainnya dalam konteks ini adalah terkait status Jakarta, sebagai satu daerah provinsi yang otonom, sebagai ibu kota Negara dan juga merupakan kota inti di kawasan megapolitan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur). Dengan demikian, koordinasi dengan pemerintah Pusat dan daerah sekitar Jakarta adalah mutlak adanya.

### **Lalu bagaimana?**

Dalam kaitannya dengan Pilkada yang di jelang Jakarta, maka dalam konteks penanganan banjir khususnya dan berbagai permasalahan kota lainnya, maka yang diperlukan Jakarta adalah Pemimpin yang “kuat”.

Kuat di sini dalam artian pemimpin yang bisa mendobrak paradigma pembangunan yang selama ini pro investor; mempunyai gaya komunikasi politik yang bagus dengan pemerintah pusat maupun daerah-daerah sekitar Jakarta; kreatif dalam membuat terobosan-terobosan kebijakan yang pro poor dan pro ecology; bermental melayani masyarakat dan bukan sebaliknya dan mampu menggalang kemitraan dengan berbagai pihak dengan tidak melupakan prinsip-prinsip *pro poor* dan *pro ecology*.

Jika kita lihat penjelasan ini maka yang diperlukan adalah revolusi pemikiran, dalam artian menata paradigma. Paradigma yang harus ditata adalah paradigma Pemprov DKI terhadap warganya, terhadap daerah sekitarnya dan juga terhadap pusat. Prinsip Jakarta untuk semua, harus dimaknai sebagai keinginan untuk mewujudkan Jakarta sebagai sebuah kota yang inklusif namun tertata dengan prinsip “adil”.

*Ketika politik kota Jakarta dimaknai sebagai kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta, maka kebijakan untuk menyelesaikan segala persoalan kota termasuk lingkungan, ada di dalamnya. Bertolak dari hal ini, maka persoalan yang timbul akibat “salah urus” isu lingkungan, akar masalahnya terletak pada politik kota yang tidak pro lingkungan.*

**-Lola Amelia-**

## **Beban Kemiskinan di Perempuan dan Relasi dengan Persoalan Pengambilan Keputusan Publik**

---

Kisah tragis baru saja terjadi di Kota Bogor pada 4 Juli 2012 silam. Seorang ibu, berusia sekitar 30 tahun mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan Pulo Empang, Kecamatan Bogor Tengah, ke Sungai Cisadane. Anaknya yang baru berumur 2 tahun, yang ikut digendong tewas bersamanya. Seorang anak laki-laki korban yang baru berumur 6 tahun, hanya bisa melihat saja aksi putus asa sang ibu. Diduga himpitan ekonomi, karena mesti menghidupi anak-anaknya tanpa kehadiran suami, membuat sang ibu nekat bunuh diri. Menurut cerita anak lakinya, sang ayah telah meninggal dunia sejak 2 tahun lalu karena sakit.

Membaca kisah ini seperti menambah daftar halaman buku kalam mengenai begitu terpuruknya kehidupan sebagian rakyat negeri ini yang “kalah”. Kekalahan rakyat yang terpuruk ini mutlak disebabkan karena kemiskinan kronis yang sudah mendarah daging. Kemiskinan menunjukkan rupanya dalam bentuk yang menakutkan dan mengharu biru di banyak episode kehidupan rakyat negeri ini.

Buku kalam kehidupan rakyat miskin menegaskan adanya persoalan dalam pengelolaan bangsa. Terwujud kontradiksi dengan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin berkurang drastis. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin pada Maret 2012 mencapai 29,12 juta orang atau 11,96 persen dari total penduduk Indonesia saat ini.

Angka tersebut turun dibanding Maret 2011 yang mencapai 30,02 juta orang (12,4 persen). Bahkan, klaim pemerintah via data BPS bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan secara signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Dalam tataran faktual, angka pencapaian statistika tersebut seakan menjadi “kering” dan berjarak dengan realitas.

Kisah tragis di Bogor ini juga merefleksikan persoalan lebih serius di balik masalah kemiskinan semata, bahwa perempuan menjadi pihak yang paling menderita atau menanggung beban terbesar dari kemiskinan yang mendera keluarga dan lingkungannya. Dalam membedah kemiskinan, stratum terberat sesungguhnya berada di tangan kaum perempuan. Bahkan, kemiskinan kerap identik dengan kehidupan perempuan.

Berulangnya kasus kekerasan seksual, prostitusi, buruh migran, trafficking, dan kekerasan lainnya, secara tidak langsung diatributkan pada kemiskinan perempuan. Ironisnya, di bidang ekonomi, kaum perempuan yang jumlahnya 52,7 persen dari total populasi penduduk, ternyata hanya memiliki seperseribu dari jumlah kekayaan dunia, dan hanya menerima 10 persen dari total gaji (MDG's, 2010).

Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian 2009, menyatakan tidak mungkin bicara kemiskinan jika tidak melibatkan perempuan. Yunus melihat perempuan peminjam lebih produktif menggunakan uangnya daripada suami. Kelaparan dan kemiskinan lebih merupakan masalah perempuan ketimbang laki-laki. Perempuan mengalami kelaparan dan kemiskinan lebih hebat dari laki-laki. Jika ada anggota keluarga yang harus mengalami kelaparan, hukum tidak tertulis mengatakan ibulah yang pertamanya akan mengalaminya.

Di Indonesia, dari jumlah penduduk miskin yang mencapai 32,53 juta jiwa (14,15%), 70% dari mereka adalah perempuan (BPS, 2009). Kemiskinan yang menimpa perempuan Indonesia, boleh jadi dilatari oleh banyak faktor. Angka buta aksara perempuan sebesar 12,28%, sedangkan laki-laki 5,84%. Dalam bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama. Angka kematian ibu (AKI) juga masih sangat tinggi, yaitu sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) daripada perempuan (50,2%).

Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda.

Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Bagi perempuan seringkali konsep ruang publik ini diartikan sebagai tempat kerja atau tempat berusaha daripada forum-forum di dalam komunitas. Keterlibatan dalam forum publik di dalam komunitas pun biasanya terbatas dan masih tidak terlepas dari peran domestiknya, seperti arisan, pengajian atau perkumpulan keagamaan.

Permasalahan ini juga muncul dalam hasil penelitian The Indonesian Institute pada tahun 2011 tentang “Kebijakan Desentralisasi dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa”. Dari penelitian lapangan di Kota Makassar dan Kabupaten Jayapura, secara umum didapati sejumlah kendala, yang secara prinsip dapat digolongkan ke dalam kategori kendala psikologis, kapasitas, disposisi waktu, budaya dan birokrat.

Kendala **psikologis** yang umumnya terjadi adalah sikap-sikap mental pada individu perempuan, yang dampaknya melemahkan partisipasi aktif perempuan. Antara lain adalah masih kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mengemukakan aspirasi.

Kendala **kapasitas** yang umumnya dialami perempuan adalah pada kemampuan mengemukakan aspirasi, kurangnya pendidikan baik formal maupun informal yang dampaknya adalah pada kurang tajamnya usulan atau aspirasi yang disampaikan tidak menyentuh pada kebutuhan dasar perempuan.

Kendala lainnya adalah disposisi **waktu**. Hal ini terutama terkait partisipasi aktif perempuan dalam forum pertemuan komunitas. Perempuan mengalami kesulitan untuk dapat menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) atau pertemuan warga karena pertemuan seringnya diadakan pada malam hari dan selesai pada larut malam, serta undangan yang disampaikan secara mendadak.

Kendala dari **keluarga** antara lain adalah masih adanya faktor keterikatan keluarga yang terkait peran ganda perempuan di ranah domestik dan publik, yang menghambat perkembangan kapasitas perempuan ke depannya. Dukungan suami juga dipandang penting bagi partisipasi aktif perempuan. Masih ada suami yang tidak

mendukung perempuan untuk maju dan aktif di luar rumah karena khawatir rumah tangga menjadi terlantar.

Kendala **budaya** (ini juga masih terkait kendala keluarga), masih terdapat batasan kultur yang membatasi mobilitas perempuan misalnya untuk pulang malam, jalan sendiri, meninggalkan kampung, dan sebagainya.

Kendala dari **birokrat**, antara lain adanya resistensi dari birokrat dan politik lokal yang khawatir bila perempuan pintar dan aktif maka elit birokrat dan politik lokal ini akan dikritisi oleh perempuan. Kendala birokratis juga tampak pada praktek Musrenbang yang menjadi tidak inklusif bagi perempuan, karena pihak birokrat gagal menyampaikan undangan Musrenbang ke warga perempuan atau undangan disampaikan mendadak, ditambah waktu pelaksanaan Musrenbang yang ditetapkan malam hari. Hal-hal yang tidak peka terhadap tantangan perempuan untuk mengimbangi perannya di ranah publik maupun ranah privat tersebut membuat perempuan tidak dapat masuk menjadi partisipan aktif dalam Musrenbang.

Persoalan lain yang dihadapi perempuan adalah pembangunan di segala bidang yang seringkali belum berpihak kepada perempuan. Program-program pembangunan secara formal seringkali dikuasai laki-laki dan karena sumber daya yang penting dalam kehidupan selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik lebih kuat, maka adanya marginalisasi terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan seringkali terabaikan.

Potret partisipasi perempuan, terutama dalam program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan kondisi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Kendala untuk partisipasi perempuan antara lain belenggu budaya patriarki, masih kurangnya kapasitas perempuan (kemampuan, kepercayaan diri, jejaring) dalam ranah publik.

Untuk itu dapat direkomendasikan sosialisasi contoh-contoh praktik yang baik di mana perempuan dapat berkiprah di ranah publik tanpa meninggalkan peran dalam rumah tangga, dan stimulasi untuk kesadaran baru bagi keluarga dan masyarakat patriarki terhadap perlu, penting, dan manfaatnya perempuan aktif berpartisipasi di ruang publik.

**- Endang Srihadi -**

*Kisah tragis di Bogor ini juga merefleksikan persoalan lebih serius di balik masalah kemiskinan semata, bahwa perempuan menjadi pihak yang paling menderita atau menanggung beban terbesar dari kemiskinan yang mendera keluarga dan lingkungannya. Dalam membedah kemiskinan, stratum tergevat sesungguhnya berada di tangan kaum perempuan. Bahkan, kemiskinan kerap identik dengan kehidupan perempuan.*



# THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

**TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

**Alamat kontak:**

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194  
Jakarta Pusat 10250 Indonesia  
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

### Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

### Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

## RISET BIDANG SOSIAL

### Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK**

### **Survei Pilkada**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

### **Pelatihan DPRD**

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## Telah Terbit

### INDONESIA REPORT 2010

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

#### TOPIK-TOPIK YANG DIANGKAT DALAM INDONESIA 2010:

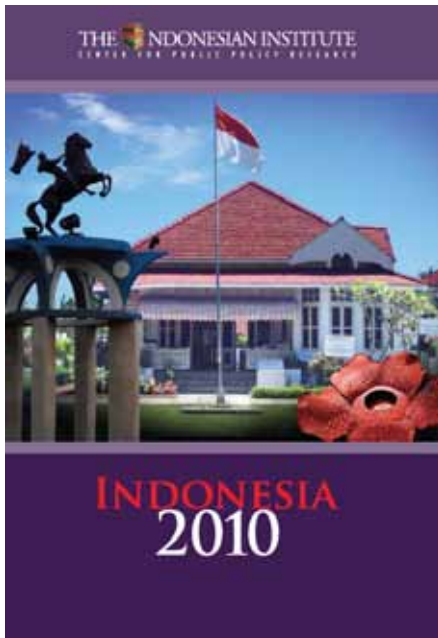
- Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera.  
Penulis: **Hanta Yuda AR**
- Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.  
Penulis: **Aly Yusuf**
- Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.  
Penulis: **Benni Inayatullah**
- Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam.  
Penulis: **Endang Srihadi**
- Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama.  
Penulis: **Antonius Wiwan Koban**

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute, dengan supervisi **Anies Baswedan**, Direktur Eksekutif & Riset, dan **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Program.

#### CARA PEMESANAN :

1. **Pembayaran ditransfer ke Rekening :**  
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta  
No. Rek. 103 000 4444 838  
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua
2. **Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita** melalui  
Fax. 021. 3190 7815 atau  
E-mail: [iethapoenya5678@yahoo.com](mailto:iethapoenya5678@yahoo.com)  
Tel. 021. 390 5558
3. **Konfirmasi pemesanan** mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan menghubungi kami di kontak tersebut di atas.



**INDONESIA 2010** merupakan laporan tahunan *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research* mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011.

Ada lima artikel dalam **Indonesia 2010** ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama.

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.

Semoga **Indonesia 2010** dapat digunakan dengan maksimal oleh berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, *private sector*, media massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

**Anies Baswedan**

*Direktur Eksekutif dan Riset  
The Indonesian Institute*

**Direktur Eksekutif & Riset**

Anies Baswedan

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro

**Peneliti Bidang Politik**

Benni Inayatullah

Hanta Yuda AR

**Peneliti Bidang Sosial**

Endang Srihadi, Lola Amelia, Viza

Juliansyah

**Staf Program dan Pendukung**

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.

**Administrasi**

Meilya Rahmi.

**Sekretaris:** Lily Fachry

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT:** Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

e-mail: [update@theindonesianinstitute.com](mailto:update@theindonesianinstitute.com)

